

PROCEEDING

— APHK IV —

MENCARI MODEL PEMBARUAN **HUKUM PERIKATAN**

Penormaan Prinsip dan Langkah Legislasi

— Palembang 9-11 Oktober 2017

PROCEEDING APHK

*Mencari Model Pembaruan Hukum Perikatan:
Penormaan Prinsip dan Langkah Legislasi*

PROCEEDING APHK

Mencari Model Pembaruan Hukum Perikatan: Penormaan Prinsip dan Langkah Legislasi

ISBN: 978-602-5562-54-9

Copyright © Oktober, 2018
x + 698 : 21cm X 29,7cm

Penulis:

Aam Suryamah
Abdul Salam
Abdullah Gofar
Adi Sulistiyono
Agung Sujatmiko
Agus Sardjono
Agus Suwandono
Ahmadi Miru
Amnawaty
Andria Luhur Prakoso
Annalisa Y
Anwar Borahima
Arief Suryono
B. Rini Heryanti
Basuki Rekso Wibowo
Budi Santoso
Chandra Yusuf
Dewi Septiana
Dewi Sukma Kristianti
Dharu Triasih
Djumikasih
Edy Lisdiyono
Ema Rahmawati
Erni Agustin
Ery Agus Priyono
Etty Mulyati
Faizal Kurniawan
Fennieka Kristianto
Fitri Hidayat
Galuh Puspaningrum
Galuh Wahyu Kumalasari
Gemala Dewi
H. A. Dardiri Hasyim
Hayatul Ismi
Helza Nova Lita
Hernawan Hadi
Herowati Poesoko
Hilda Yunita Sabrie
Ignasius Sumarsono Raharjo
Imelda Martinelli
Inayah
Johan's Kadir Putra
L. Budi Kagramanto
M. Isnaeni
M. Sofyan Pulungan
Marhaeni Ria Simbo
Maria Fransisca
Mohammad Zamroni
Mokhammad Khoirul Huda
Muchammad Zaidun

Muhammad Syaifuddin
Neneng Nurhasanah
Neni Sri Imaniyati
Ninis Nugraheni
Nun Harrieti
Nur Sulistyo Budi Ambarini
Nuswardhani
Prawitra Thalib
Pupung Faisal
Purnama Trisnamansyah
Rahayu Hartini
Rahma Fitri
Rahmi Jened
Rai Mantili
Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas
Reka Dewantara
Ria Setyawati
Rilda Murniatia
Rizky Amalia
Rosalinda Elsina Latumahina
Rosnidar Sembiring
Rudy Haposan Siahaan
Rudyanti Dorotea Tobing
Sakka Pati
Septarina Budiwati
Sherly Ayuna Putri
Shinta Puspita Sari
Siti Hamidah
Sri Astutik
Sri Mulyani
Sri Turatmiyah
Sri Walny Rahayu
Sulistyardari
Syahrul Sajidin
Tasya Safiranata
Ulfa Hasanah
Wahyu Prawesthi
Widaningsih
Wilma Laura Sahetapy
Winner Sitorus
Wirdyaningsih
Wishnu Kurniawan
Wurianalya Maria Novenanty
Y. Sari Murti Widiyastuti
Yan Watequlis Syaifudin
Yanly Gandawidjaja
Yenny Eta Widyanti
Yulia Kusuma Wardanib
Zahry Vandawati

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari pihak penerbit.

Cover: Rahardian Tegar
Lay Out: Kamilia Sukmawati

Edisi IV, 2018

Diterbitkan pertama kali oleh *Inteligensia Media*
Jl. Joyosuko Metro IV/No 42 B, Malang, Indonesia
Telp./Fax. 0341-588010
Email: inteligensiamedia@gmail.com

Didistribusikan oleh **CV. Cita Intrans Selaras**
Wisma Kalimetro, Jl. Joyosuko Metro 42 Malang
Telp. 0341-573650
Email: intrans_malang@yahoo.com

Kata Pengantar ...

Yth. Para Kolega Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Pembaca yang budiman,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Konferensi Nasional Hukum Keperdataan IV dapat diterbitkan. Seminar dengan tema “**Mencari Model Pembaruan Hukum Perikatan: Penormaan Prinsip dan Langkah Legislasi**” telah dilaksanakan pada tanggal 9-11 Oktober 2017 di Palembang Sumatra Selatan dengan bekerjasama antara Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Berbagai artikel mengenai perikatan di Indonesia disajikan dalam konferensi tersebut dan dimuat dalam prosiding ini.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perdata di Indonesia berkarakter pluaralistik, di mana terdapat tiga hukum sekaligus yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan diakui keberadaannya oleh Negara, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat (bersumber dari KUH Perdata). Demikian pula halnya hukum perikatan sebagai salah satu bagian dalam hukum perdata di mana ketiga hukum tersebut hidup dan berlaku di masyarakat. Konferensi ini berupaya menghimpun pemikiran dan pandangan akademik mengenai fenomena pluralistik hukum perikatan yang ada di Indonesia yang dapat berlaku dengan harmonis serta diakui oleh Negara. Pemikiran dan pandangan akademik tersebut diharapkan menjadi salah satu bahan dalam upaya menghasilkan hukum perdata dalam hal ini hukum perikatan yang bercorak Indonesia.

Akhirnya, kami yakin bahwa kumpulan artikel dari para anggota APHK dalam prosiding ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata serta memajukan dan memberikan energi ke arah pembaharuan hukum perdata nasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan konferensi hingga penerbitan prosiding ini. Selamat membaca dan semoga artikel-artikel yang tersaji dalam prosiding ini dapat mengembangkan budaya akademik di kalangan anggota APHK dan menginspirasi pembaharuan hukum perikatan nasional.

Surabaya, September 2018

Ketua APHK,

Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Daftar Isi ...

1. URGENSI ASAS KONSENSUALISME DALAM KONTRAK
(*Moch. Isnaeni*) -- 1
2. KARAKTERISTIK KONTRAK-KONTRAK KHUSUS DALAM BIDANG HUKUM KEPERDATAAN: Upaya Konstitusionalisasi Kontrak
(*Agus Sardjono*) -- 12
3. PENERAPAN PRINSIP PACTA SUNT SERVANDA DAN DAYA MENGIKATNYA DALAM KONTRAK KOMERSIAL
(*Ahmadi Miru*) -- 22
4. UPAYA HUSUM OLEH KREDITOR DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI
(*Herowati Poesoko*) -- 29
5. DOKTRIN CORPORATE OPPORTUNITY DALAM RANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(*Rahmi Jened*) -- 41
6. PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NEGARA DAN INVESTOR ASING ATAS PERUBAHAN KEBIJAKAN INVESTASI DIBIDANG PERTAMBANGAN
(*Muchammad Zaidun*) -- 48
7. HAKIKAT DAN VALIDITAS HUKUM PERJANJIAN ISLAM: SUATU PERBANDINGAN
(*Abdullah Gofar*) -- 64
8. KAPASITAS SUBJEK HUKUM DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM
(*Anwar Borahima*) -- 73
9. PILIHAN FORUM DAN PILIHAN HUKUM DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL
(*Basuki Rekso Wibowo*) -- 83
10. KEDUDUKAN UTANG PAJAK DAN UPAH BURUH/PEKERJA DALAM KEPAILITAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2013
(*Rahayu Hartini*) -- 95
11. "INTENTION TO CREATION LEGAL RELATION" (ICLR): ANTARA REALITA DAN DESIDERATA
(*Adi Sulistiyono*) -- 109

12. PERJANJIAN KARTEL DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(*L. Budi Kagramanto*) -- 117
13. PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERKAIT PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN COMMERCIAL BUILDING DIATAS TANAH WAKAF
(*Helza Nova Lita*) -- 123
14. PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH OFF BALANCE SHEET DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(*Nun Harrieti*) -- 132
15. AKAD MUDHARABAH DALAM PENGELOLAAN DANA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)
(*Sri Astutik*) -- 141
16. KEDUDUKAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH SEBAGAI ASAS YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN HUKUM KONTRAK NASIONAL
(*Dewi Sukma Kristianti*) -- 148
17. PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI PATEN UNTUK ALIH TEKNOLOGI
(*Agung Sujatmiko*) -- 164
18. PENYALAHGUNAAN MEREK TERKENAL SEPHORA DALAM PRAKTIK BISNIS BERKAITAN DENGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
(*Sherly Ayuna Putri dan Tasya Safiranata*) -- 175
19. PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN NASIONAL DALAM LEMBAGA KEUANGAN BANK
(*Neni Sri Imaniyati, Neneng Nurhasanah, dan Sri Mulyani*) -- 182
20. PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(*Yenny Eta Widyanti*) -- 203
21. KONSTRUKSI HUKUM JAMINAN KESEHATAN BPJS KESEHATAN
(*Arief Suryono*) -- 212
22. STANDAR PELAYANAN PENUMPANG: KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN KOMERSIAL BERTARIF MURAH
(*Annalisa Y*) -- 218
23. PERJANJIAN JUAL BELI ON LINE DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
(*Dharu Triasih dan B. Rini Heryanti*) -- 229
24. URGENSI TERM AND CONDITION PADA E-COMMERCE
(*Wilma Laura Sahetapy*) -- 235
25. PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK
(*M. Zamroni dan M. Khoirul Huda*) -- 243
26. REFORMASI MODEL PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(*Amnawaty dan Dewi Septiana*) -- 254

27. HUKUM E-COMMERCE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(*Johan's Kadir Putra*) -- 261
28. ANALISA TERHADAP PERJANJIAN YANG BATAL DEMI HUKUM (SOLUSI KESALAHAN PENERAPAN "NON APPLE TO APPLE")
(*Chandra Yusuf*) -- 267
29. ASAS IKTIKAD BAIK SEBAGAI UNSUR DALAM HUKUM PERIKATAN ATAU HUKUM PERJANJIAN
(*Imelda Martinelli*) -- 273
30. PARADIGMA PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK STANDAR DI INDONESIA
(*Galuh Wahyu Kumalasari dan Andria Luhur Prakoso*) -- 285
31. PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN
(*Pupung Faisal, Agus Suwandono, Purnama Trisnamansyah*) -- 291
32. PENGEMBANGAN PRINSIP-PRINSIP UMUM UNIVERSAL PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI ONLINE UNTUK MEMPERKUAT LEX INFORMATICA
(*Ignasius Sumarsono Raharjo*) -- 300
33. PROBLEMATIKA DALAM PERJANJIAN ASURANSI MELALUI INTERNET
(*Zahry Vandawati, dan Hilda Yunita Sabrie*) -- 311
34. PENERAPAN PRINSIP PERJANJIAN ASURANSI PADA ASURANSI JIWA UNIT LINK
(*Inayah dan Nuswardhani*) -- 319
35. ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM PENYELENGGARAAN COORDINATION OF BENEFIT (CoB) JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA PESERTA PENERIMA UPAH
(*Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas*) -- 325
36. ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA OLEH PT TASPEN
(*Budi Santoso*) -- 332
37. URGENSI KEBERADAAN ASURANSI KERUGIAN TERHADAP BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI SURABAYA
(*Hilda Yunita Sabrie, Zahry Vandawati, Rizky Amalia, dan Prawitra Thalib*) -- 341
38. HUKUM ADAT SEBAGAI LANDASAN PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN NASIONAL
(*M. Sofyan Pulungan*) -- 348
39. PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN INDONESIA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN DAN KEADILAN
(*Wahyu Prawesthi*) -- 362
40. BATASAN PILIHAN HUKUM DALAM KONTRAK INTERNASIONAL
(*Winner Sitorus*) -- 367
41. PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL MELALUI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERDASARKAN CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL SALES OF GOODS 1980
(*Sakka Pati*) -- 371

42. PERKEMBANGAN ARBITRASE INTERNASIONAL SEBAGAI PRANATA PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG DI INDONESIA
(*Andria Luhur Prakoso dan Galuh Wahyu Kumalasari*) -- 379
43. PENYELARASAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT SEBAGAI LANGKAH PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN
(*Ulfia Hasanah dan Hayatul Ismi*) -- 386
44. PEMBAHARUAN KONTRAK ANTARA LEMBAGA JASA KEUANGAN DENGAN KONSUMENNYA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 01/POJK.07/2014 TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN
(*Aam Suryamah dan Ema Rahmawati*) -- 391
45. PENGAWASAN MARKET CONDUCT JASA KEUANGAN PERBANKAN OLEH OJK INDONESIA
(*Sulistiyandari*) -- 400
46. PROBLEMATIKA HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM ONLINE MARKETPLACE
(*Ria Setyawati*) -- 406
47. MODEL PENGEMBANGAN PENYUSUNAN KONTRAK SEBAGAI PEDOMAN DALAM UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
(*H. A. Dardiri Hasyim*) -- 413
48. PENGATURAN SYARAT SAHNYA KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK (ONLINE)
(*Maria Fransisca*) -- 425
49. HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK NASIONAL
(*Rosnidar Sembiring*) -- 434
50. KRISTALISASI HUKUM ADAT INDONESIA DALAM HUKUM PERJANJIAN
(*Rudy Haposan Siahaan*) -- 441
51. MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BERBASIS PERADILAN ADAT LAUT DAN KOMPARASINYA DI INDONESIA
(*Sri Walny Rahayu*) -- 449
52. KESEPAKATAN PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(*Yanly Gandawidjaja*) -- 460
53. PILIHAN AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI ECONOMIC ANALYSIS OF LAW
(*Siti Hamidah*) -- 470
54. LEMBAGA EKONOMI KOPERASI SEBAGAI SARANA TRANSFORMASI HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK NASIONAL
(*Nur Sulistyo Budi Ambarini dan Rahma Fitri*) -- 480
55. TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA FINTECH TERHADAP PENGGUNA T-CASH SEBAGAI APLIKASI BERBASIS MOBILE PAYMENT BERDASARKAN PBI NO. 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN
(*Reka Dewantara*) -- 487

56. KEADILAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
(*Rudyanti Dorotea Tobing*) -- 497
57. KESEIMBANGAN KEDUDUKAN DEBITUR DAN KREDITUR PERDAGANGAN E-COMMERCE DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ODR (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)
(*Widaningsih, Yan Watequlis Syaifudin*) -- 504
58. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LENDER DAN BORROWER DALAM PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA
(*Wurianalya Maria Novenanty*) -- 511
59. PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTAGDIGHEDEN*) DALAM KESEPAKATAN PERJANJIAN KREDIT
(*Etty Mulyati*) -- 521
60. MODEL PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DAN USAHA BESAR DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN BERSAMA
(*Rai Mantili*) -- 529
61. ANALISIS BISNIS PAYTREN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN ISLAM
(*Fitri Hidayat*) -- 536
62. PERSEKONGKOLAN TENDER SEBAGAI SEBUAH PERIKATAN TERLARANG
(*Hernawan Hadi*) -- 546
63. KONSEPTUALISASI PENGATURAN E-CONTRACT DI INDONESIA
(*Galuh Puspaningrum*) -- 555
64. KLAUSULA EKSONERASI DALAM BROSUR PENAWARAN PADA JUAL BELI RUMAH
(*Wishnu Kurniawan, Ninis Nugraheni*) -- 562
65. ASAS ASAS HUKUM PERIKATAN YANG SESUAI DENGAN PANCASILA
(*Djumikasih*) -- 570
66. KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH ORMAS DENGAN BERLAKUNYA PERPU ORMAS
(*Shinta Puspita Sari*) -- 578
67. MENCARI PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERIKATAN YANG BERKARAKTER KE-INDONESIAAN
(*Septarina Budiwati*) -- 587
68. AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MENGGUNAKAN HAK EX OFFICIO DALAM PERKARA PERCERAIAN
(*Sri Turatmiyah, Muhammad Syaifuddin*) -- 595
69. KEPAILITAN PADA BENTUK USAHA BUKAN BADAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI HARTA BERSAMA PERKAWINAN
(*Rilda Murniatia, Yulia Kusuma Wardanib*) -- 603
70. MENCARI MODEL KESEIMBANGAN SISTEM KONSINYASI DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI TANAH MILIK RAKYAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH
(*Edy Lisdiyono dan Setiyowati*) -- 614
71. ADAKAH KONSEP GANTI RUGI AKIBAT PMH?
(*Marhaeni Ria Siombo*) -- 621

72. URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN INDONESIA (SUATU KAJIAN FILOSOFIS)
(*Ery Agus Priyono*) -- 626
73. WANPRESTASI DALAM PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
(*Syahrul Sajidin*) -- 633
74. MENCARI MODEL PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN INDONESIA (Relevansi Legislasi Prinsip-prinsip Hukum Perikatan Islam Ke Dalam Tata Hukum Nasional)
(*Gemala Dewi, Wirdyaningsih*) -- 645
75. PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN KAJIAN TERHADAP ASAS DAN MODEL NORMA
(*Y. Sari Murti Widiyastuti*) -- 655
76. ANONIMITAS DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: PENGARUHNYA TERHADAP KEABSAHA PERJANJIAN
(*Abdul Salam*) -- 660
77. TANGGUNG GUGAT MEDIS (*MEDICAL LIABILITY*) DALAM PERBANDINGAN HUKUM
(*Rosalinda Elsina Latumahina*) -- 672
78. HARDSHIP DAN AKIBATNYA TERHADAP KEBERLAKUAN KONTRAK
(*Rizky Amalia, Erni Agustin, dan Faizal Kurniawan*) -- 684
79. REGULATION ON VALID ELECTRONIC CONTRACT ON ELECTRONIC TRANSACTION (ON LINE) ABSTRACT
(*Fennieka Kristianto*) -- 690

PENGEMBANGAN PRINSIP-PRINSIP UMUM UNIVERSAL PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI ONLINE UNTUK MEMPERKUAT LEX INFORMATICA

- Dr. Ignasius Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum. -

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E-mail: ig_son@yahoo.co.id

ABSTRAK

Lex Informatica mempunyai analog untuk elemen-elemen kunci dari sebuah kelompok legal. Kerangka bangunan dasar untuk regulasi legal adalah hukum itu sendiri. Dalam Lex Informatica, standar arsitektur adalah berupa sebuah rangkaian blok bangunan analog. Standar arsitektur dapat berupa HTTP yang merupakan struktur dasar dan pokok dari arus informasi dalam sebuah jejaring komunikasi. Dibutuhkan pengamanan regulasi yang baik karena transaksi online dalam ruang siber hanya dibatasi oleh screens and passwords. Pengembangan prinsip-prinsip umum perjanjian dan indikasi obyektif, urgensinya sangat relevan karena prinsip-prinsip perjanjian tersebut saling keterhubungan (interconnectedness) dengan lex informatica yang menjadi basis transaksi online. Prinsip-prinsip perjanjian umum universal secara klasik berbasiskan pada hukum kontrak pada umumnya yang mempunyai fleksibilitas melalui yurisprudensi-yurisprudensi dan doktrin yang dikembangkan sehingga menjadi basis untuk memperkuat lex informatica.

Transaksi online yang bercirikan paperless, borderless, anonim berkembang dengan penanganan dari informasi digital yang menawarkan stabilitas dan prediktabilitas sehingga didapatkan keyakinan yang cukup diantara para netizens untuk mengembangkan diri seperti pengaturan hukum kontrak terhadap bisnis yang memberikan kepercayaan diri dan vitalitas untuk para pebisnis. Oleh karena itu, stabilitas dan kemapanan keberlakuan prinsip-prinsip umum universal menjadi penting untuk memberikan kepercayaan transaksi online yang semakin bertumbuh.

Kata kunci: *Prinsip Umum Perjanjian, Lex Informatica, transaksi online*

Pendahuluan

Kematangan internet sebagai jejaring global melalui teknik jaringannya, perantara (intermediary) dan teknologi pada dasarnya menyediakan format untuk negara secara lebih besar menegakkan peraturan-peraturan dan kebijakan hukum. Dunia maya memberikan pelajaran bagaimana peranan hukum dan sekaligus memberikan pilihan-pilihan untuk kehidupan baru itu yaitu bagaimanakah nilai-nilai yang tertanam di dalamnya apakah yang akan kita inginkan. Bila diperbandingkan antara dunia maya dan dunia nyata (konvensional) nampak terjadi persinggungan nyata yaitu bidang hukum, norma sosial, pasar, dan bangunan arsitektural/sistem.

Dunia konvensional/nyata melalui sistem hukum yang ada semuanya relatif bisa berjalan dengan efisien tergantung pada pilihan-pilihan yang dibuat yaitu misalnya menggunakan penyelesaian litigasi maupun non-litigasi apabila terjadi sengketa atau fungsi hukum pada

dasarnya bisa berjalan dengan efisien karena langsung menimbulkan akibat yang nyata di dalam sebuah konstruksi kehidupan sosial. Berbeda halnya dalam saling keterhubungan di dunia maya. Dunia maya mempunyai karakteristik yaitu bahwa hukum mengatur kebiasaan-kebiasaan dalam dunia maya bisa sangat efisien bisa juga tidak efisien tergantung kasuistiknya. Norma sosial dalam keberlakuannya juga sangat berbeda antara dunia nyata maupun dunia maya. Dunia nyata apabila norma sosial dilanggar, misalnya dalam relasi antar lawan jenis yang tidak sopan maka masyarakat sekitar akan memberikan sanksi sosial seketika berbeda yang berbeda dengan dunia maya, karena merupakan ruang bebas, tanpa batas, kadang-kadang bersifat anonim sehingga biarpun dilakukan dengan suatu tindakan paksaan maka akan sangat sulit untuk dilaksanakan. Demikian juga dengan hambatan-hambatan di dalam pasar. Dalam dunia nyata pasar sangat mempengaruhi kehidupan manusia karena riil dirasakan, namun di dunia maya tidak secara mutlak berpengaruh atau pengaruh akan dirasakan kemudian. Bangunan arsitektural justru sebaliknya. Dunia maya sangat tergantung pada arsitekturalnya karena akan membentuk kebiasaan. Bangunan yang diciptakan di internet akan sangat mempengaruhi kehidupannya dan bahkan membentuk kebiasaan baru para natizens.

Negara dalam memenuhi tanggung jawab mereka kepada masyarakat bisa secara maksimal memanfaatkan *lex informatica* sebagai alat untuk penegakan keputusan-keputusan yang diambil dan kebijakan-kebijakan lain atas aktivitas online. Oleh karena itu dalam transaksi-transaksi online yang dikuasai oleh prinsip-prinsip perjanjian umum perlulah dilakukan kajian sehingga prinsip-prinsip perjanjian bisa dijadikan basis fundamental untuk memperkuat *lex informatica*. Hal ini penting karena perkembangan e-commerce di Indonesia tumbuh paling tinggi di dunia. 3 (tiga) tahun terakhir makin banyak pelaku usaha yang bermigrasi usahanya ke online baik pengusaha besar maupun ritel, seperti halnya hasil riset idEA. Demikian juga Data Sensus Ekonomi BPS 2016 menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir tumbuh rata-rata 17% dengan total jumlah usaha E-com mencapai 26,2 juta unit. Riset global Bloomberg menyimpulkan bahwa pada tahun 2020 diprediksikan lebih separuh penduduk Indonesia akan terlibat di aktivitas E-com. Akselerasi transaksi online ini menurut McKinsey akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga US\$ 150 miliar dollar pada tahun 2025 karena didukung oleh pengguna internet oleh 73% yang mengakses lewat *smartphone*. Infrastruktur bangunan arsitektural online yang diprakarsai BUMN Telkom tentunya menjadi suatu keniscayaan. Hal ini karena perkembangan netizen terus akseleratif (2013: 72,8 juta; 2016: 102,8 juta dan diprediksi 2017: 112,6 juta). BI mencatat ada 24,7 juta orang yang berbelanja online. Nilai transaksi E-com diprediksi mencapai Rp. 144 triliun pada tahun 2018 yaitu naik dari Rp. 69,8 triliun di tahun 2016 dan Rp. 25 triliun di tahun 2014.¹

Penguatan *lex informatica* melalui pengembanan prinsip-prinsip umum perjanjian merupakan langkah paling tepat untuk mendukung keamanan transaksi online karena akselerasi e-com membutuhkan pengaturan yang berbasiskan pada kebiasaan-kebiasaan perdagangan yang mengakar di khasanah global karena online adalah berkaitan dengan otoritas entitas untuk memilih hukum yang cocok dalam interconnectedness transaksi online, termasuk di dalamnya prinsip UNIDROIT, *The Principles of European Contract Law* dan pertimbangan hukum nasional Indonesia.

Metode Penelitian

Paper ini merupakan penelitian hukum dalam ranah kajian yuridis normatif/doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan suatu upaya inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif serta upaya menemukan hukum inkonkrito.² Hal

¹ Liputan 6.com, 14 Agustus 2017, akses 27 September 2017.

² Soetandyo Wignyoebroto, *Masalah Metodologik Dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Masalahnya, Keragaman Pendekatan konseptualnya*, Makalah Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, Dirjen Dikti, Jakarta, 1994:4.

ini ditegaskan oleh Terry Hutchinson³ (2002:9) bahwa "*Doctrinal research – research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and perhaps, predict future development.*" Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁴ Oleh karena itu maka penelitian hukum normatif ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang ada dalam transaksi online yang kompleksitasnya sangat tinggi guna menjawab isu hukum yang dihadapi yaitu bagaimana prinsip-prinsip hukum umum perjanjian yang universal berlaku dalam kerangka pengembangan *lex informatica* sehingga *lex informatica* tersebut menjadi sarana menyelesaikan problematika hukum yang berkembang dalam transaksi online. Isu hukum yang ditemukan akan dikaji dalam tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

Hasil dan Pembahasan

Pengembangan hukum *cyberlaw* telah dengan cepat memunculkan pandangan bahwa sebaiknya kegiatan-kegiatan dalam *cyberspace* diatur oleh hukum tersendiri, dengan mengambil contoh tentang tumbuhnya *the law of merchant (lex mercatoria)* pada abad pertengahan.⁵ Asas, kebiasaan dan norma yang mengatur ruang siber ini yang tumbuh dalam praktek dan diakui secara umum disebut sebagai *Lex Informatica*.⁶ *Lex informatica* berkembang dari *lex mercatoria*.⁷ Kebangkitan modern dari *lex mercatoria* dapat ditelusuri terutama pada tahun 1960an, biarpun seperti *Incoterms* (ditulis th. 1936), UCP 600 yang berkembang sampai sekarang adalah merupakan *lex mercatoria*. Hasil dari *lex mercatoria* ini adalah berupa dokumen-dokumen hukum seperti konvensi-konvensi internasional, *model law*, *legal guide*, standarisasi kontrak. *Lex mercatoria* yang berkembang sekarang setelah adanya migrasi orang dalam melakukan hubungan hukum online yaitu *lex informatica*.⁸

Lex Informatica telah berkembang menuju kekhasannya. *Lex Informatica* mempunyai analog untuk elemen-elemen kunci dari sebuah kelompok legal. Kerangka bangunan dasar untuk regulasi legal adalah hukum itu sendiri. Dalam *Lex Informatica*, standar arsitektur adalah berupa sebuah rangkaian blok bangunan analog. Standar arsitektur dapat berupa HTTP yang merupakan struktur dasar dan pokok dari arus informasi dalam sebuah jejaring komunikasi.

Lex informatica mempunyai keuntungan yang merupakan karakteristik khasnya yaitu pertama, bahwa aturan teknologi tidak bergantung pada negara-negara yang berdaulat dengan hukum konvensional masing-masing; kedua, kemudahan kustomisasi aturan-aturan standar melalui berbagai macam aplikasi teknis yang seragam sehingga menghilangkan hambatan-

³ Hutchinson, Terry, *Researching and Writing in Law*, Pyrmont, NSW: Lawbook Co., 2002:9

⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012:57.

⁵ David R. Johnson and David Post, "Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace", 481 *Stanford Law Review* 1996, p.1369.

⁶ Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, 2004, h.21.

⁷ Istilah *lex mercatoria* diartikan kebiasaan dalam praktik bisnis yang semula berlaku diantara para pebisnis yang tidak tertulis akan tetapi kemudian menjadi tertulis melalui putusan hakim, diunifikasikan seperti UCP 600, dalam putusan-putusan arbitrase, kode etik profesional, prinsip umum hukum perjanjian, standarisasi kontrak dalam ICC, FIDIC, UNCITRAL melalui susunannya di dalam CISG dan UNIDROIT dengan prinsip-prinsip UNIDROITnya. Satu hal yang penting dari *lex mercatoria* ini adalah harmonisasi dan uniformitas hukum telah berhasil dilakukan dalam globalisasi. Bandingkan dengan Taryana Soenandar, *Prinsip-prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004:1-2.

⁸ Istilah *Lex Informatica* digunakan tidak seragam karena ada yang menyebut *New Lex Mercatoria*, *Lex Electronica*, juga, *lex mercatoria* bukan sebagai hukum tunggal namun bervariasi dari industri ke industri dalam bentuk terpisah seperti "*lex petrolea*", *lex constructionis*, *lex maritime*, dan analisis yang dilakukan, substansi sama dan seragam, lihat: Fabrizio Marrella (University "Ca Foscari of Venice, marrella@unive.it) and Christopher S. Yoo (University of Pennsylvania, esyoo@law.upenn.edu), *Open Source Software, The New Of Lex Mercatoria*, University of Pennsylvania Law School, Penn Law: Legal Scholarship Repository, http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship; Ethan Katsh, *Online Dispute Resolution: Some Implications for the Emergence of Law in Cyberspace*, *Lex Electronica*, vol.10 n°3, Hiver/Winter 2006. <http://www.lex-electronica.org/articles/v10-3/katsh.html>; Taryana Soenandar, *op.cit.*; Lawrence Lessing, Jack N. and Lillian R. Berkman Professor for Entrepreneurial Legal Studies, Harvard Law School; dalam "*The Law of The Horse: What Cyberlaw Might Teach*", An earlier draft of this article was posted at the Stanford Technology Law Review, <<http://stlr.stanford.edu>>.

hambatan batas Negara; ketiga, aturan teknologi juga dapat mengambil manfaat dari built in self untuk penegakan aturan dan daya guna atau kemampuan kepatuhan tata arsitektural teknologi informasi.

Yurisdiksi *lex informatica* adalah jaringan itu sendiri. Aturan teknologi diberlakukan diseluruh jaringan yang relevan, sehingga, *lex informatica* tidak mengenal batas negara, yurisdiksi tidak dikenal, pilihan masalah hukum yang dihadapi oleh suatu rezim hukum tertentu ketika jaringan menyeberangi garis yurisdiksi suatu territorial atau suatu negara

Lex Informatica disadari atau tidak selalu berkibrah dalam kerangka paradigma tertentu yang tidak terjebak dengan menetapkan batas-batas wilayah kegiatan ilmiahnya serta menentukan keabsahan masalah yang menjadi obyek penelitiannya karena sifat 'virtual', artifisial, *boderless*, *paperless*, yang terkandung dalam *cyberlaw*.⁹ Problem paradigmatic *lex informatica* adalah bahwa hukum ini diinginkan sebagai solusi terhadap pengembangan kegiatan di *cyberspace*, namun di sisi lain, kelayakannya dibatasi oleh hukum yang keberlakuannya bersifat geografis-konvensional serta adanya pilihan hukum. Hukum yang seperti itu (geografis-konvensional dan adanya pilihan hukum) tidaklah mungkin diaplikasikan untuk kegiatan di *cyberspace* yang tidak mempunyai batasan-batasan secara jelas geografisnya. Aplikasi seperti itu menciptakan suatu masalah sebab tidak praktis dan tak adil. Setidaknya terdapat dua problem yaitu:¹⁰

- (1) *certain laws will necessarily involve gaining the approval of the governed, and thus gaining the necessary consensus may be difficult;*
- (2) *the internet's global and decentralized nature will prevent any single law-making authority from applying cyberlaws across cyberspace. Thus, a better solutions, involves the creation of network-specific jurisdictions, similar to individual country/state jurisdictions. These jurisdictions should be self-governing with respect to laws that will impact only the "residents" of that jurisdiction.*

Kehendak untuk menciptakan yurisdiksi spesifik terhadap kegiatan di *cyberspace* adalah merupakan keinginan dan solusi yang paling tepat. Hal ini karena teknologi informasi yang menciptakan "ruang baru" yaitu *cyberspace* bersifat artifisial dan maya serta ruang baru ini mengalihkan sebagian besar aktivitas manusia dari "dunia nyata" ke dalam berbagai bentuk substitusi artifisial. Terjadi suatu migrasi besar-besaran dari sebagian besar aktivitas manusia dari 'dunia nyata' ke dalam suatu 'dunia maya' sehingga *cyberspace* yang dibentuk melalui jaringan jutaan komputer, telepon dan modem memunculkan komunitas baru yaitu 'virtual community' dalam sebuah ruangan sendiri yaitu 'cyberspace' serta realitasnya sendiri yaitu 'virtual reality'. Sedang hukum yang geografis-konvensional berpijak dalam dunia nyata, sehingga terjadi sebuah kesenjangan. Titik temu yang dapat dijadikan interrelasi subyek *cyberspace* yaitu manusia. Apapun kehidupan bisa saja dilakukan dalam ruang maya itu namun, subyeknya tetap manusia, sehingga melalui subyek inilah hukum dapat memberikan perannya dalam menyelesaikan isu-isu hukum yang muncul biarpun dalam bentuknya yang baru dan sering sangat mendasar.

Cyberspace telah memberikan persoalan ontologis dan fenomenologis tentang "ada" dan "keberadaan" bila dilinierkan dengan "ada" dan "keberadaan" dalam dunia kehidupan nyata keseharian yang merupakan kompleksitas suatu kesadaran, pengalaman dan persepsi manusia. Sehubungan dengan "ada" dan "keberadaan" ini, membawa dampak terhadap hukum khususnya yang berkenaan dengan: (1). "*persoon* atau *persoonrecht*" sebagai subyek hukum karena di-*cyberspace* terjadi perubahan mendasar tentang diri (self) dan identitas (identity), (2). hubungan hukum, karena di dalam *cyberspace* pada hakekatnya adalah sebuah bentuk jejaring

⁹ Bandingkan dengan Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, h.218.

¹⁰ Joanna Zakalik, *International Jurisdiction and Conflict of Laws in Cyberspace*, Internet Jurisdiction Hyperlink Guide, www.kentlaw.edu, 2017:11.

dan relasi yang menciptakan *interconnectedness* dan *interdependency*, (3). "tempat" karena di dalam *cyberspace*, istilah tempat adalah merupakan ruang imajiner di dalam bit-bit komputer yang sangat berbeda dengan ruang nyata dengan dibatasi oleh geopolitis dan hukum.

Berkenaan dengan perkembangan transaksi online, hukum perlu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sehubungan dengan subyek hukum perjanjian. Hukum konvensional memberikan konsepsi tentang subyek hukum sebagai suatu konsep umum untuk memberikan penjelasan dan penggambaran hukum positif yang sangat berkaitan erat dengan kewajiban hukum, hak hukum serta kewenangan hukum. Subyek hukum dengan demikian pendukung kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak hukum yaitu berkenaan dengan 'memperoleh', 'menyandang' atau 'mempunyai' kewajiban-kewajiban dan hak-hak hukum itu. Dalam hal 'memiliki' kewajiban-kewajiban dan hak-hak hukum itu maka seseorang atau badan hukum disebut mempunyai kewenangan hukum.¹¹ Dalam gagasan tentang keharusan adanya sesuatu yang mempunyai kewajiban dan hak, suatu kecenderungan umum dari pemikiran manusia diwujudkan. Hans Kelsen setuju dengan pendapat tentang pemikiran ini.¹²

Subyek hukum dimengerti sebagai 'memiliki' kewajiban-kewajiban dan hak-hak hukum berdasarkan substansi yang memiliki kualitas-kualitasnya yaitu seperti halnya subyek tata bahasa memiliki predikat-predikatnya. Subyek hukum yang terpenting adalah sebagai satu kesatuan dengan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dipersonifikasikan dari seperangkat norma hukum karena kewajiban-kewajiban dan hak-hak itu adalah norma hukum sendiri.

Apabila subyek hukum dimengerti sedemikian maka lazim dibedakan: pribadi fisik dan pribadi hukum yang menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. John Austin memberikan definisi pribadi fisik yaitu seseorang manusia yang dipandang sebagai dianugerahi dengan hak-hak, atau dipandang sebagai subyek dari kewajiban-kewajiban.¹³ Atau dengan kata lain seseorang pribadi adalah seorang manusia yang dianggap sebagai subyek dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak. Setiap manusia Indonesia tanpa kecuali adalah subyek hukum sejak dilahirkan, selama hidupnya dan apabila meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya tertentu (misalnya: pewarisan, hak akan pensiun) beralih kepada ahli warisnya. Namun tidak seluruh hak dan kewajiban hukum melekat pada seorang manusia sebagai pribadi. Dapat terjadi seseorang X menjadi subyek hak tertentu atau mempunyai hak tertentu yang berarti bahwa perbuatan hukum seseorang X tersebut menjadi obyek dari suatu hak hukum tertentu itu. Perbuatan hukum yang dilakukan X tersebut adalah merupakan isi dari suatu norma hukum. Demikian juga sebaliknya, apabila X sebagai subyek dari suatu kewajiban tertentu atau mempunyai suatu kewajiban tertentu, berarti bahwa perbuatan hukum tertentu X tersebut adalah merupakan isi dari suatu kewajiban hukum dan menjadi suatu norma hukum. Berarti pula bahwa hak dan kewajiban seseorang tidak berarti sebagai keseluruhan dari eksistensinya. Bahkan keseluruhan tatanan hukum tidak pernah menentukan seluruh eksistensi dari seseorang manusia yang menjadi subyek tatanan tersebut, atau mempengaruhi seluruh fungsi mental dan jasmaninya.¹⁴ Hal pokok lain yang terpenting adalah bahwa mendefinisikan pribadi fisik sebagai seseorang manusia adalah keliru karena seseorang manusia dan seorang pribadi bukan hanya dua konsep yang sangat berbeda dipandang dari ilmu hukum analitik yang diterima secara umum, tetapi juga sebagai akibat dari dua jenis pertimbangan yang sepenuhnya berbeda. Manusia adalah suatu konsep biologis dan fisiologis dari sisi ilmu-ilmu pengetahuan alam sedang pribadi (*persoon*) adalah suatu konsep ilmu hukum yaitu konsep dari analisis norma-norma hukum.¹⁵ Sebagai

¹¹ Lihat, Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.68.

¹² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif)*, (Terj. Somardi), Rimdi Press, -, 1995, h.95.

¹³ *Ibid.*, h.96.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

konsep ilmu hukum maka Pasal 3 BW (juga Pasal 15 UUDS) bisa menjadi contoh konkrit, yang berbunyi bahwa: "tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan". Oleh karena itu maka pribadi fisik adalah personifikasi dari seperangkat norma hukum yang, karena merupakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang mengandung tindakan-tindakan seseorang pribadi dan manusia yang sama, mengatur tindakan manusia ini.

Disamping *persoon* (manusia pribadi), dikenal juga badan hukum (*rechtspersoon*). Adanya konsep badan hukum, menunjukkan suatu konsep ilmu hukum yang berkembang sehingga pernyataan yang menyatakan bahwa "pribadi fisik adalah seseorang manusia" sebagai pernyataan yang keliru. Hal ini dapat dijelaskan sbb:¹⁶

"...dari fakta bahwa apa yang berlaku bagi manusia yang disebut seseorang "pribadi" sama sekali tidak selalu berlaku bagi "pribadi" fisik tersebut. Pernyataan bahwa seseorang manusia mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak, sama sekali tidak mengandung suatu pengertian atau hanya sebagai tautologi yang hampa makna. Pernyataan ini berarti bahwa seperangkat kewajiban dan hak, yang kesatuannya dipersonifikasikan dengan konsep 'pribadi', 'mempunyai' kewajiban-kewajiban dan hak-hak."

Oleh karena itu maka analogi badan hukum berasal dari manusia pribadi. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban.¹⁷ Dalam konteks "pribadi" maka pribadi individu-individu yang membentuknya mempunyai perbedaan dengan pribadi dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban badan hukum itu. Badan hukum bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti pribadi manusia. Badan hukum dipandang sebagai pribadi karena peraturan hukum menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para anggota sehingga dapat ditafsirkan sebagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari badan hukum itu sendiri. Para anggota melakukan perbuatan hukum atas nama badan hukum itu sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban diciptakan olehnya. Maka, hukum menentukan kapan seseorang itu bertindak atas nama pribadi dan kapan seseorang itu bertindak sebagai organ-organ dari badan hukum. Kecenderungan umum para ahli menyatakan bahwa suatu badan hukum tidak bisa mempunyai kehendak seperti halnya seseorang pribadi mempunyai kehendak agar menjadi seorang pribadi hukum. Orang-orang dalam organ-organ suatu badan hukum berkehendak atas nama badan hukum tersebut yaitu bahwa organ-organ ini memanifestasikan suatu kehendak, bukan badan hukum, dan bahwa peraturan hukum melekatkan kepada pernyataan-pernyataan kehendak ini efek menciptakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari badan hukum.¹⁸

Paradigma hukum atas subyek hukum seperti uraian di atas, pada dasarnya ingin menunjukkan identitas pribadi seseorang yang berarti bahwa seperangkat kewajiban dan hak, yang kesatuannya dipersonifikasikan dengan konsep identitas 'pribadi', 'mempunyai' kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang sama di depan hukum, dalam arti, hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang pribadi tetap tidak sama dalam hal kepentingannya memang berbeda, sehingga membawa efek pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda-beda pada diri seseorang, namun, sebaliknya apabila dalam "kepentingannya" sama, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban tiap orang sama di depan hukum. **Kepentingan apakah yang didapatkan dengan pengembanan konsep hak dan kewajiban subyek hukum dalam transaksi online?** Dari sisi identitas diri seseorang, *cyberspace* telah mengubah paradigma tentang identitas diri seseorang karena *cyberspace* membuka seluas-luasnya setiap orang untuk secara artifisial membangun konsep tentang diri (*self*) dan identitas (*identity*). Hakekat identitas dan diri seseorang

¹⁶ Ibid., h.97.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo IV, Op.cit., p.68.

¹⁸ Hans Kelsen, Op.cit., h.109.

telah berkembang, yang oleh sebagian orang menjadi konsep yang tidak bermakna lagi. Hal ini karena melalui konsep artifisial dalam *cyberspace*, seseorang dapat menciptakan berbagai identitas secara variatif, berbeda-beda dan tidak terbatas, sehingga patut dipertanyakan apakah pada hakekatnya masih terdapat identitas. Konsep hukum tentang pribadi adalah merupakan suatu konstruksi pemikiran hukum yang samasekali berbeda dengan konsep manusia, sehingga identitas diri sebagai pribadi fisik sesungguhnya adalah pribadi hukum dalam konstruksi pemikiran hukum sehingga tidak ada perbedaan yang essensial. Dengan adanya konsep hukum konvensional sedemikian, apakah dapat mengkonstruksi tentang identitas diri seseorang yang mempunyai kepentingan hukum di *cyberspace*? Identitas diri dalam bentuk pribadi seseorang dapat dikatakan “ada” apabila terdapat “perbedaan” antara seseorang dengan seseorang lain. Dalam kenyataan di *cyberspace*, seseorang dapat menjadi berwajah jamak karena dapat mempermainkan identitas diri yaitu adanya identitas palsu, identitas baru, identitas ganda, identitas yang jamak. Di *cyberspace*, orang dapat melakukan ‘kloning’ pribadi fisik yang konvensional menjadi tak berhingga sesuai dengan kebutuhan. Dalam konstruksi hukum tentang subyek hukum, diperlukan adanya rekonstruksi ulang pemikiran hukum tentang pribadi yang menjadi identitas (*identity*) dan diri (*self*) manusia. Tugas melakukan rekonstruksi ulang pemikiran hukum tentang ‘pribadi seseorang’ adalah menjadi ranah *cyberlaw*, oleh karena itu *cyberlaw* keberadaannya menjadi penting untuk menyelesaikan identitas diri seseorang karena kekacauan identitas akan mempengaruhi aspek-aspek personalitas dan persepsi dalam hukum karena subyek hukum penting dalam menyelesaikan hubungan hukum para pihak. *Cyberlaw* diperlukan karena *cyberspace* berperan besar melalui sifat artifisialnya untuk menjadikan setiap orang menjadi siapapun dan semua orang bisa menjadi beberapa orang yang berbeda-beda pada saat yang bersamaan. Dan sifat artifisial ini menjadi masalah besar dalam hukum konvensional karena hukum konvensional dibatasi oleh batas-batas ruang/tempat serta waktu. Salah satu contoh, waktu malam dalam hukum konvensional sangat menentukan dalam penyelesaian kasus hukum sedang di *cyberspace*, waktu menjadi relatif karena *cyberspace* adalah ruang yang tidak terbatas dan tidak mengenal waktu.

Terminologi hukum menyatakan bahwa hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan antar *persoon/rechtspersoon* yang mempunyai akibat hukum. Biasanya dibedakan atas hubungan yang sederajat (koordinatif) dan hubungan yang tidak sederajat (subordinatif) atau hubungan timbal balik serta hubungan yang timpang. Pada umumnya hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan “hak” pada satu pihak dan melekatkan “kewajiban” kepada pihak lainnya. Dalam hukum perjanjian hal ini menjadi amat jelas. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, hukum bekerja untuk memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tadi dipenuhi. Tetapi tidak semua hubungan antar manusia adalah hubungan hukum, karena hubungan hukum selalu berimplikasi yaitu adanya akibat hukum. Salah satu contoh adalah bahwa untuk menilai suatu hubungan hukum disebut perikatan atau bukan maka hukum mempunyai kriteria tertentu yaitu dapat dinilai dengan uang. Namun kriterium ini semakin lama sukar untuk dipertahankan, karena dalam hubungan antar anggota masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Apabila terhadapnya tidak diberikan akibat hukum, nilai rasa keadilan tidak akan terpenuhi, padahal salah satu tujuan hukum disamping kepastian adalah keadilan. Oleh karena itu kriterium hubungan hukum diletakkan pada uang telah bergeser pada rasa keadilan dalam masyarakat.

Hakekat hubungan *cyberspace* adalah sebuah bentuk jejaring (*web*) dan hubungan (*connection*) terjadi bukan karena materi yang menciptakan *interconnectedness* (saling keterhubungan) dan

telah berkembang, yang oleh sebagian orang menjadi konsep yang tidak bermakna lagi. Hal ini karena melalui konsep artifisial dalam *cyberspace*, seseorang dapat menciptakan berbagai identitas secara variatif, berbeda-beda dan tidak terbatas, sehingga patut dipertanyakan apakah pada hakekatnya masih terdapat identitas. Konsep hukum tentang pribadi adalah merupakan suatu konstruksi pemikiran hukum yang samasekali berbeda dengan konsep manusia, sehingga identitas diri sebagai pribadi fisik sesungguhnya adalah pribadi hukum dalam konstruksi pemikiran hukum sehingga tidak ada perbedaan yang essensial. Dengan adanya konsep hukum konvensional sedemikian, apakah dapat mengkonstruksi tentang identitas diri seseorang yang mempunyai kepentingan hukum di *cyberspace*? Identitas diri dalam bentuk pribadi seseorang dapat dikatakan “ada” apabila terdapat “perbedaan” antara seseorang dengan seseorang lain. Dalam kenyataan di *cyberspace*, seseorang dapat menjadi berwajah jamak karena dapat memperlakukan identitas diri yaitu adanya identitas palsu, identitas baru, identitas ganda, identitas yang jamak. Di *cyberspace*, orang dapat melakukan ‘kloning’ pribadi fisik yang konvensional menjadi tak berhingga sesuai dengan kebutuhan. Dalam konstruksi hukum tentang subyek hukum, diperlukan adanya rekonstruksi ulang pemikiran hukum tentang pribadi yang menjadi identitas (*identity*) dan diri (*self*) manusia. Tugas melakukan rekonstruksi ulang pemikiran hukum tentang ‘pribadi seseorang’ adalah menjadi ranah *cyberlaw*, oleh karena itu *cyberlaw* keberadaannya menjadi penting untuk menyelesaikan identitas diri seseorang karena kekacauan identitas akan mempengaruhi aspek-aspek personalitas dan persepsi dalam hukum karena subyek hukum penting dalam menyelesaikan hubungan hukum para pihak. *Cyberlaw* diperlukan karena *cyberspace* berperan besar melalui sifat artifisialnya untuk menjadikan setiap orang menjadi siapapun dan semua orang bisa menjadi beberapa orang yang berbeda-beda pada saat yang bersamaan. Dan sifat artifisial ini menjadi masalah besar dalam hukum konvensional karena hukum konvensional dibatasi oleh batas-batas ruang/tempat serta waktu. Salah satu contoh, waktu malam dalam hukum konvensional sangat menentukan dalam penyelesaian kasus hukum sedang di *cyberspace*, waktu menjadi relatif karena *cyberspace* adalah ruang yang tidak terbatas dan tidak mengenal waktu.

Terminologi hukum menyatakan bahwa hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan antar *persoon/rechtpersoon* yang mempunyai akibat hukum. Biasanya dibedakan atas hubungan yang sederajat (koordinatif) dan hubungan yang tidak sederajat (subordinatif) atau hubungan timbal balik serta hubungan yang timpang. Pada umumnya hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan “hak” pada satu pihak dan melekatkan “kewajiban” kepada pihak lainnya. Dalam hukum perjanjian hal ini menjadi amat jelas. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, hukum bekerja untuk memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tadi dipenuhi. Tetapi tidak semua hubungan antar manusia adalah hubungan hukum, karena hubungan hukum selalu berimplikasi yaitu adanya akibat hukum. Salah satu contoh adalah bahwa untuk menilai suatu hubungan hukum disebut perikatan atau bukan maka hukum mempunyai kriteria tertentu yaitu dapat dinilai dengan uang. Namun kriterium ini semakin lama sukar untuk dipertahankan, karena dalam hubungan antar anggota masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Apabila terhadapnya tidak diberikan akibat hukum, nilai rasa keadilan tidak akan terpenuhi, padahal salah satu tujuan hukum disamping kepastian adalah keadilan. Oleh karena itu kriterium hubungan hukum diletakkan pada uang telah bergeser pada rasa keadilan dalam masyarakat.

Hakekat hubungan *cyberspace* adalah sebuah bentuk jejaring (*web*) dan hubungan (*connection*) terjadi bukan karena materi yang menciptakan *interconnectedness* (saling keterhubungan) dan

interdependency (saling kebergantungan) secara virtual. *cyberspace* adalah dunia baru yaitu dunia bit-bit informasi dengan kepentingan utama hubungan komunikasi-informasi yang bersifat virtual dan interaksinya bukan antar fisik dalam suatu tempat (teritori atau wilayah) yang fisik konvensional tetapi dalam sebuah halusinasi teritorial (*territorial hallucination*). Oleh karena itu maka waktu, tempat, jarak tidak menjadi ukuran yang pasti dan berakibat kepada perubahan interaksi sosial manusia. Bagaimanakah dengan hakekat hubungan hukum dalam konteks saling keterhubungan dan kebergantungan dalam *cyberspace*? Dengan pengertian hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan antar *persoon/rechtspersoon* yang mempunyai akibat hukum dengan menggunakan kriterium rasa keadilan masyarakat perlu telaah baru karena *cyberspace* adalah sebuah dunia yang mengubah setiap "ada" (*beings*) diubah wujudnya menjadi "ada citra" (*being images*) sehingga setiap "ontologi" diubah menjadi "ontologi citraan". Paradigma hubungan hukum tentu saja, silogismus, kurang lebih menempatkan diri ke arah yang sama dalam pencitraannya. Oleh karena itu maka hubungan hukum melalui virtual tentu saja memunculkan konsepsi-konsepsi baru. Demikian juga dengan konsepsi waktu, tempat/teritori. Penulis berpendapat aktualisasi perikatan-perikatan yang dibangun dalam perjanjian perlu kajian ulang terutama dalam keabsahan perjanjian. Keabsahan subyektif yaitu kecakapan dalam transaksi online tidak dapat digunakan ukuran kedewasaan seperti dalam hukum konvensional. Kecakapan cukup diartikan sebagai seseorang mampu mengoperasikan bangun arsitektural online. Common law system yang senyawa dengan transaksi online dikemukakan oleh Cracknell¹⁹ bahwa kontrak terbentuk karena: (1). Intention to create a legal relationship, (2). Agreement (offer and acceptance), (3). Consideration.

Prinsip fundamental dalam kontrak/perjanjian internasional yaitu prinsip dasar supremasi (kedaulatan hukum nasional) dan prinsip dasar kebebasan berkontrak, sedangkan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional terdiri dari: (a) prinsip *pacta sunt servanda*, (b). prinsip (*utmost*) *good faith* (ikhtikad baik [yang sempurna]), dan (c). prinsip resiprositas (resiprokal).²⁰ Prinsip ini juga tidak berbeda dengan yang diatur dalam *The Principles of European Contract Law*. Berkaitan dengan prinsip umum universal seperti prinsip kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, *good faith* dan resiprokal menjadi standar umum dalam berkontrak. Catatan perlu diberikan dengan prinsip kedaulatan hukum nasional yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya, yang mutlak kekuatan mengikatnya, mempersulit *interconnectedness* transaksi online.

Kedaulatan transaksi online agar sesuai dengan karakternya jelas diperlukan. Instrumen teknologi mempunyai alat yang sangat kuat yang bisa digunakan negara-negara berdaulat untuk sanksi aktor internet dalam transaksi online. Negara-negara dapat menggunakan kekuatan *lex informatica* dan menggunakan teknologi untuk menerapkan tindakan penegakan hukum sehingga dalam ranah global terdapat harmonisasi setidaknya dan unifikasi peraturan transaksi online dalam tataran ideal. Model-model law yang diterbitkan oleh UNCITRAL dapat dijadikan sarana untuk harmonisasi dan unifikasi hukum. Dunia perbankan, *lex informatica* sebenarnya telah berjalan dengan adanya standarisasi perbankan yang melakukan transaksi e-banking dengan menggunakan Kode SWIFT²¹ via freemit.com dalam rangka menyiasati kerumitan yang terjadi didalam pertukaran informasi perbankan di seluruh dunia. Transaksi online yang berbasiskan pada *lex informatica* juga nampak jelas didalam transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan

¹⁹ Cracknell, D.G., *Obligation: Contract Law*, Old Bailey Press, London, 2003:7.

²⁰ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Rafika Aditama, Bandung, 2007:19-20.

²¹ SWIFT adalah the *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* yang memberikan kemudahan kepada banyak anggotanya karena efisiensi dan efektivitas software tersebut teruji. Dia bisa mengurangi risiko operasional, menekan besaran biaya, karena optimalisasi kinerja IT dan standarisasi transaksi keuangan dunia. SWIFT juga dikenal dengan nama BIC (Bank Identifier Code) yang terdiri dari 8 sd 11 karakter aphanumeric yang unik dan panjangnya sesuai dengan standar internasional berbasiskan algoritma. Anggota SWIFT sekarang terdiri dari 209 negara dan lebih dari 10.000 lembaga perbankan, sekuritas dan nasabah berbagai korporasi.

bursa pada umumnya di dunia yang menggunakan Scripless Trading e-book Settlement (perdagangan tanpa warkat dengan pemindahbukuan secara elektronik). Perdagangan efek lewat internet, IOSCO (International Organization Securities Commissions) memberikan rekomendasi beberapa poin keamanan transaksi online yaitu (1) aplikasi persyaratan peraturan perdagangan melalui internet; (2). Pelaksanaan kewenangan dalam pengaturan transaksi cross border melalui internet; (3). Pemanfaatan internet untuk meningkatkan edukasi dalam penyebaran informasi kepada publik; dan (4). pemanfaatan internet untuk meningkatkan kerja sama di bidang penegakan peraturan.²²

Pengalaman praktek perbankan dan pasar modal dalam penerapan lex informatica adalah contoh konkrit bagaimana lex informatica bukan hanya semata kajian teoritik. Transaksi online dapat mencontoh sistem perbankan dan pasar modal yang notabene didalamnya beredar uang yang sangat banyak namun aman dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi. Transaksi online melalui e-com dapat dijadikan metode bisnis yang menciptakan norma dan standar hukum dalam dunia maya. Dengan dipicu bahwa negara demokrasi menjunjung tinggi bagi kebebasan berekspresi sehingga negara-negara berdaulat memiliki tantangan besar untuk dapat memiliki status quo. Terlebih dalam Konggres pertama di dunia mengenai dunia maya (Oktober 2011) melalui "Resolution of Quo" mencoba membentuk suatu norma yang berlaku di internet dan kebebasan yang fundamental selaras dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian. Pembatasannya adalah keamanan suatu negara, keamanan publik atau kondisi ekonomi suatu negara, menghindari kejahatan, melindungi nilai moral yang mapan dan melindungi hak-hak kebebasan pihak lain. Kasus *Yahoo!., v. La Ligue Contre le Racisme et L'antisemitisme* dan kasus *Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing, Inc.*,²³ menjadi contoh konkrit yang dapat ditingkatkan menjadi Lex Informatica karena dari kasus tersebut hukum yang ada berfungsi untuk memfasilitasi warga negara dalam teknologi informasi yang berkembang.

Keuntungan dan implikasi dari Lex informatica yang bersinggungan dengan hukum yaitu bahwa Lex informatica dapat membatasi kemampuan hukum untuk menangani masalah. Seperti yang terlihat dengan arsitektur internet saat ini dan dipraktekkan oleh beberapa gubernur dan walikota di Indonesia melalui e-budgeting dan keberadaan world wide web (www), maka keputusan territorial untuk mengatasi pilihan-pilihan kebijakan sosial dapat dilakukan secara sepihak. Nampak bahwa Lex informatica juga dapat mampu menggantikan hukum ketika aturan teknologi yang lebih mampu untuk menyelesaikan masalah kebijakan.

Kemampuan itu nampak dari perkembangan prinsip-prinsip hubungan hukum dalam transaksi online yaitu²⁴ (1). The Theory of the Uploader and the Downloader (yaitu setiap Negara dapat melarang kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya); (2). The Law of the Server (yaitu memperlakukan server dimana wbpages secara fisik berlokasi maka hokum di daerah tersebut berlaku; (3). The Theory of International Spaces (menganggap bahwa ruang siber adalah merupakan the fourth space sehingga sifat internasional yaitu sovereignles quality yang diutamakan).

Kesimpulan

1. Lex Informatica mempunyai analog untuk elemen-elemen kunci dari sebuah kelompok legal. Kerangka bangunan dasar untuk regulasi legal adalah hukum itu sendiri. Dalam Lex Informatica, standar arsitektur adalah berupa sebuah rangkaian blok bangunan analog.

²² Bapepam, *Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004*, Bapepam dan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 1999:17-27.

²³ Joel R. Reidenberg, *Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology*, 76Tex. L. Rev.553 (1997-1998) Available at: http://ir.lawnet.fordham.edu/faculty_scholarship/42.

²⁴ Darrel Menthe, *Jurisdiction in Cyberspace: a Theory of International Scrace*, available at <http://www.mtlr.org/volfour/menthe.html>, 2000:3-8.

Standar arsitektur dapat berupa HTTP yang merupakan struktur dasar dan pokok dari arus informasi dalam sebuah jejaring komunikasi. Dengan demikian Lex Informatica dapat membangun hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum konvensional. Persinggungan keduanya dimanfaatkan hukum konvensional untuk berfungsi sebagai fasilitator.

2. Prinsip-prinsip umum perjanjian yang berlaku universal pada dasarnya menjadi dasar bagi berkembangnya dan menjadi postur untuk memperkuat Lex Informatica. Hanya dalam prinsip kedaulatan hukum nasional yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya, yang mutlak kekuatan mengikatnya, mempersulit *interconnectedness* transaksi online. Perlu pengkajian kembali prinsip tersebut dengan menyesuaikan karakter umum dari lex informatica.
3. Berkaitan dengan subyek hukum dalam transaksi online, perlu pengkajian ulang khususnya dari sisi identitas diri seseorang, *cyberspace* telah mengubah paradigma tentang identitas diri seseorang karena *cyberspace* membuka seluas-luasnya setiap orang untuk secara artifisial membangun konsep tentang diri (*self*) dan identitas (*identity*). Hal ini karena melalui konsep artifisial dalam *cyberspace*, seseorang dapat menciptakan berbagai identitas secara variatif, berbeda-beda dan tidak terbatas, sehingga patut dipertanyakan apakah pada hakekatnya masih terdapat identitas. Konsep hukum tentang pribadi adalah merupakan suatu konstruksi pemikiran hukum yang samasekali berbeda dengan konsep manusia, sehingga identitas diri sebagai pribadi fisik sesungguhnya adalah pribadi hukum dalam konstruksi pemikiran hukum sehingga tidak ada perbedaan yang esensial.

Daftar Bacaan

- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyberlaw dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Bapepam, 1999, *Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004*, Bapepam dan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Cracknell, D.G., 2003, *Obligation: Contract Law*, Old Bailey Press, London.
- Darrel Menhe, 2000, *Jurisdiction in Cyberspace: a Theory of International Scrace*, available at <http://www.mttl.org/volfour/menthe.html>
- David R. Johnson and David Post, 1996, "Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace", 481 *Stanford Law Review*.
- Ethan Katsh, 2006, *Online Dispute Resolution: Some Implications for the Emergence of Law in Cyberspace*, *Lex Electronica*, vol.10 n°3, Hiver/Winter 2006. <http://www.lex-electronica.org/articles/v10-3/katsh.html>.
- Hans Kelsen, 1995, *General Theory of Law and State (Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif)*, (Terj. Somardi), Rimdi Press, Jakarta.
- Huala Adolf, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Rafika Aditama, Bandung.
- Hutchinson, Terry, 2002, *Researching and Writing in Law*, Pyrmont, NSW: Lawbook Co., London.
- Joel R. Reidenberg, *Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology*, 76 *Tex. L. Rev.* 553 (1997-1998) Available at: http://ir.lawnet.fordham.edu/faculty_scholarship/42.
- Johny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Lessing,, Lawrence, Jack N. and Lillian R. Berkman Professor for Entrepreneurial Legal Studies, Harvard Law School ; dalam *"The Law of The Horse: What Cyberlaw Might Teach"*, An earlier draft of this article was posted at the Stanford Technology Law Review, <<http://stlr.stanford.edu>>.

Liputan 6.com, 14 Agustus 2017, akses 27 September 2017.

Marrella, Fabrizio (University "Ca Foscari of Venice, marrella@unive.it) and Christopher S. Yoo (University of Pennsylvania, esyoo@law.upenn.edu), *Open Source Software, The New Of Lex Mercatoria*, University of Pennsylvania Law School, Penn Law: Legal Scholarship Repository, http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship.

Soetandyo Wignyosoebroto, *Masalah Metodologik Dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Masalalnya, Keragaman Pendekatan konseptualnya*, Makalah Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, Dirjen Dikti, Jakarta, 1994:4.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *.Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Taryana Soenandar, 2004, *Prinsip-prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zakalik, Joanna, 2017, *International Jurisdiction and Conflict of Laws in Cyberspace*, Internet Jurisdiction Hyperlink Guide, www.kentlaw.edu.

ISBN: 978-602-5562-54-9

